

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Perekonomian suatu negara dibangun atas dua sektor, yaitu sektor riil dan sektor moneter. Sektor riil adalah sektor ekonomi yang ditumpukan pada sektor manufaktur dan jasa. Sedangkan sektor moneter ditumpukan pada sektor perbankan (Nurbaya, 2013).

Pembangunan ekonomi disuatu negara sangat bergantung pada perkembangan dinamis dan kontribusi nyata dari sektor perbankan. Ketika sektor perbankan terpuruk, perekonomian Indonesia juga ikut terpuruk. Demikian pula sebaliknya, ketika perekonomian mengalami stagnasi, sektor perbankan juga terkena imbasnya dimana fungsi intermediasi tidak berjalan normal. Krisis moneter 1997-1998 yang melanda perekonomian Indonesia telah berimbas pada sektor perbankan. Krisis tersebut menyebabkan ledakan kredit macet sehingga melunturkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Akibat dari krisis tersebut banyak bank-bank konvensional yang terpaksa dilikuidasi.

Keterpurukan perbankan pada saat krisis tersebut tidak berimbas pada perbankan Syariah karena selama periode krisis tersebut secara operasional Bank Syariah tidak menerapkan sistem bunga tetapi sistem bagi hasil. Hal ini dapat dibuktikan dari keberhasilan Bank Muamalat melewati krisis yang terjadi pada tahun 1998 dengan menunjukkan kinerja yang semakin meningkat dan tidak menerima sepeserpun bantuan dari pemerintah dan pada krisis keuangan tahun

2008, Bank Muamalat bahkan mampu memperoleh laba Rp 300 miliar lebih (Asih, 2012). Perbankan Syariah juga mampu bertahan dari tepaan krisis global pada tahun 2008. Perbankan Syariah tetap stabil dan memberikan keuntungan, kenyamanan serta keamanan bagi para pemegang sahamnya, pemegang surat berharga, peminjam dan para penyimpan dana di Bank-bank Syariah.

Dalam menjalankan bisnis perbankan yang penuh dengan resiko Bank tidak terlepas dari resiko pembiayaan bermasalah (*Non Performing Loan*) NPL Bank perlu mengatur strategi agar tingkat NPL di Bank tidak dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Secara umum besarnya rasio NPL menjadi salah satu indikator kesehatan sebuah Bank (Retnadi, 2006).

NPL setidaknya menimbulkan permasalahan bagi pemilik Bank dan pemilik deposito. Pertama bagi pemilik Bank, dengan semakin tinggi NPL mereka tidak menerima *return* pasar dari modal mereka. Kedua untuk pemilik deposito tidak menerima *return* pasar dari deposito atau tabungan mereka. Bank membagi kegagalan kredit mereka kepada pemilik deposito dengan cara menekan tingkat suku bunga. Dalam kasus yang lebih buruk, jika Bank mengalami kebangkrutan deposan akan kehilangan aset atau dihadapkan dengan jaminan yang tidak seimbang. Bank juga membagi risiko kerugian mereka kepada debitur lain dengan cara menetapkan suku bunga pinjaman yang tinggi. Tingkat bunga deposito yang rendah dan suku bunga pinjaman yang tinggi akan menekan tabungan dan pasar keuangan, dan menghambat pertumbuhan ekonomi. *Non performing loan* akan mengakibatkan jatuhnya sistem perbankan, mengkerutnya pasar saham dan bahkan mengakibatkan kontraksi dalam perekonomian. (Nasution, 2007)

Sebagaimana diketahui pasca krisis hebat 1997, Indonesia pada tahun 2005 dan 2008 kembali terkena krisis. Tahun 2005 kondisi makro ekonomi terjadi peningkatan inflasi yang dipicu oleh meningkatnya harga minyak dunia, tercatat pada tahun 2005 harga bahan bakar minyak bersubsidi meningkat dua kali yaitu sebesar 30% pada Maret 2005 dan sebesar 100% pada Oktober 2005 sehingga menyebabkan inflasi mencapai 17,11% pada Desember 2005. Sedangkan pada tahun 2008 dipicu oleh krisis *sub prime mortgage* di AS serta lonjakan harga minyak dunia yang tak terkendali, kajian Bank Indonesia menginformasikan bahwa di Indonesia terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh menurunnya tingkat konsumsi dan ekspor, melemahnya daya beli masyarakat, serta menurunnya permintaan luar negeri seiring dengan perlambatan ekonomi global (Hemawan, 2008).

Kondisi demikian berpengaruh pada perkembangan industri perbankan Indonesia, tidak terkecuali industri perbankan Syariah, khususnya pada penyaluran kredit, atau dalam terminologi Bank Syariah, kredit disebut pembiayaan (UU no 21 tahun 2008). Perkembangan aset dan pembiayaan Bank Syariah dapat digambarkan pada tabel 1.1 berikut:

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Aset Bank Syariah**

Indikator	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Bank Syariah	48.014	79.186	116.930	147.581	180.300	232.820
Unit Usaha Syariah	18.076	18.333	28.536	47.437	61.916	79.100
<b>Total</b>	<b>66.090</b>	<b>97.519</b>	<b>145.466</b>	<b>195.018</b>	<b>242.276</b>	<b>311.920</b>

*Sumber: Statistik perbankan Syariah BI \*)Dalam miliar rupiah*

Pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan total aset perbankan setiap tahunnya. Pada tahun 2013 total aset perbankan telah mencapai angka Rp

242.276 Miliar yang terdiri dari Bank Syariah sebesar Rp 180.360 Miliar dan Unit Usaha Syariah sebesar Rp 61.916 Miliar. Angka tersebut meningkat dari tahun 2012 sebanyak Rp 47.258 Miliar dari total aset perbankan pada tahun 2012 sebesar 195.018 Miliar. Total Aset terbesar masih didominasi oleh Bank Syariah.

**Tabel 1.2**

**Perkembangan Indikator Perbankan Syariah di Indonesia**

Indikator	2009	2010	2011	2012	2013	2014
FDR (%)	89,7	87,6	91,41	120,65	95,87	91,50
NPF (%)	4,01	3,02	2,52	2,26	2,62	4,33%

*Sumber : Statistik Perbankan Syariah september 2015*

Penyaluran pembiayaan pada perbankan Syariah telah menunjukkan kualitas yang baik. Hal tersebut dapat dilihat dari *Financing to Deposit Ratio* (FDR) sudah mencapai titik aman yaitu 85% - 110% sesuai dengan harapan Bank Indonesia. Rendahnya angka FDR membuktikan bahwa peran intermediasi perbankan Syariah belum optimal, sedangkan tingginya angka FDR dapat menimbulkan resiko likuiditas bagi Bank. Oleh karena itu Bank Indonesia membatasi titik rendah dan tinggi rasio FDR. Pada tahun 2012, angka FDR telah melewati angka aman yaitu 120,65 %. Padahal pada tahun 2010, 2011, dan 2013 angka FDR telah mencapai titik aman. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, rasio FDR dihitung dari pembagian pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk antar Bank) dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang mencakup giro, tabungan, dan deposito (tidak termasuk antar Bank).

Didalam dunia perbankan Syariah, pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh Bank kepada masyarakat dapat mengandung resiko berupa tidak lancarnya

pembayaran yang mampu mempengaruhi kinerja Bank yang biasa disebut dengan pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF). Besarnya NPF sudah ditentukan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 5%. Tingginya pembiayaan bermasalah akan menuntut Bank untuk menyediakan alokasi dana lain sebagai cadangan menutup kerugian tersebut dan Bank akan mengurangi penyaluran pembiayaan berikutnya (Suwarsi, 2008). Pada Bank Syariah tingkat NPF masih menunjukkan batas aman, hanya saja pada tahun 2009 angka NPF mencapai angka 4,01 %. Pada tahun selanjutnya tingkat NPF hanya berkisar 2% saja. Fenomena tingginya NPL menyebabkan kengangan Bank untuk menyalurkan pembiayaan yang disebut *credit crunch*.

Penelitian ini memiliki kelebihan dibandingkan dengan penelitian lainnya mulai metode yang diambil hingga data yang diambil dalam kurun waktu yang berbeda. Dengan menggunakan data terbaru sehingga hasil yang didapat akan lebih menggambarkan situasi perbankan saat ini.

Berdasarkan data fluktuasi *non performing financing* di lapangan dan gap hasil-hasil penelitian, peneliti mencoba meneliti lebih lanjut penelitian di atas, dengan judul “Analisis Pengaruh *Gross Domestic Product, Inflasi, Rasio Retrun Bagi Hasil (RR) dan Rasio Resiko Financing(RF)* Terhadap Rasio *Non Performing Financing* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2009-2014”.

## **B. Batasan Masalah Penelitian**

Dalam pementian ini penulis hanya membatasi tiga Bank Syariah yang mempunyai kriteria untuk menjadi sample yaitu Bank Muammalat Indonesia,

Bank Syariah Mandiri dan Bank Syariah Mega Indonesia pada kurun tahun 2009-2014. Dalam penelitian ini juga mengolah data menggunakan data panel yang diolah menggunakan Eviews 09.

### **C. Rumusan Masalah Penelitian**

Dari latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *Gross Domestic Product* secara parsial berpengaruh terhadap Rasio *Non Performing Financing* Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Apakah *Inflasi* berpengaruh secara parsial terhadap Rasio *Non Performing Financing* Bank Umum Syariah di Indonesia?
3. Apakah kebijakan jenis pembiayaan Bank Syariah yang direpresentasikan dengan rasio *retrun* pembiayaan *profit loss sharing* dibanding *retrun* total pembiayaan secara parsial berpengaruh terhadap Rasio *Non Performing Financing* Bank Umum Syariah di Indonesia?
4. Apakah kebijakan jenis pembiayaan Bank Syariah yang direpresentasikan dengan rasio *alokasi piutang Murabahah* terhadap alokasi pembiayaan *profit loss sharing* secara parsial berpengaruh terhadap Rasio *Non Performing Financing* Bank Umum Syariah di Indonesia?

### **D. Tujuan penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh GDP terhadap NPF pada Bank Umum Syariah di Indonesia

2. Menganalisis pengaruh Inflasi terhadap NPF pada Bank Umum Syariah di Indonesia
3. Menganalisis kebijakan jenis pembiayaan RR terhadap NPF pada Bank Umum Syariah di Indonesia
4. Menganalisis kebijakan jenis pembiayaan RF terhadap NPF pada Bank Umum Syariah di Indonesia

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membarikan manfaat secara teoritis, sehingga dapat berguna sebagai sumbangan bagi dunia pendidikan khususnya ekonomi keuangan dan perbankan syariah.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Penulis

Menambah wawasan penulis mengenai produk pembiayaan Bank Syariah dalam menganalisis dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia.

###### b. Bagi Lembaga Terkait

- 1) Sebagai masukan yang membangun guna meningkatkan kualitas lembaga Bank Syariah yang ada di Indonesia, dan penentu kebijakan dalam lembaga terkait, serta pemerintah secara umum.

- 2) Dapat menjadi pertimbangan untuk diterapkan dalam lembaga Bank Syariah yang ada di Indonesia sebagai solusi terhadap permasalahan ekonomi yang ada.

c. Bagi Ilmu Pengetahuan

Menambah khazanah keilmuan tentang kinerja Bank Syariah dalam hal produk pembiayaan, sehingga mengetahui berapa besar kontribusi dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia.



